



## **Budaya Maritim Maluku dan Hubungannya dalam Perdagangan Rempah-Rempah Masa VOC, 1605-1799**

Natalya Claire Pessy,<sup>1\*</sup> Leli Yulifar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

\*natalyapessy@upi.edu

Dikirim: 25-11-2024; Direvisi: 11-02-2025; Diterima: 12-02-2025; Diterbitkan: 30-04-2025

**Abstrak:** Artikel ini menyoroti kepulauan Maluku sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dunia, memiliki budaya maritim yang kuat dan memainkan peran penting dalam dinamika perdagangan global pada masa VOC (1605–1799). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara budaya maritim dan perdagangan rempah di Maluku dan peninggalan budaya maritim di Maluku. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya maritim masyarakat Maluku berkontribusi besar dalam membangun jaringan perdagangan global sekaligus menghadapi tekanan kolonialisme. Sehingga budaya maritim Maluku memiliki hubungan yang erat dalam perdagangan rempah masa VOC, dimulai dari peninggalan perahu lokal masyarakat, kearifan lokal yang berkaitan dengan laut, dan pemahaman mengenai musim, cuaca, dan navigasi yang dimiliki oleh masyarakat Maluku.

**Kata Kunci:** budaya maritim; Maluku; perdagangan rempah; VOC

**Abstract:** This article highlights the Maluku islands as the center of the world spice trade, having a strong maritime culture and playing an important role in the dynamics of global trade during the VOC period (1605-1799). This research aims to explain the relationship between maritime culture and spice trade in Maluku and the legacy of maritime culture in Maluku. This research uses the historical method which consists of: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results showed that the maritime culture of the Moluccan people contributed greatly to building a global trade network while facing the pressure of colonialism. Thus, Maluku maritime culture has a close relationship with the spice trade during the VOC era, starting from the heritage of local boats, local wisdom related to the sea, and understanding of seasons, weather, and navigation owned by the Maluku people.

**Keywords:** Maluku; maritime culture; spice trade; VOC



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

### **Pendahuluan**

Secara geopolitik, Negara Republik Indonesia adalah negara yang wilayahnya diselimuti dengan lautan (*archipelago*) yang mana hampir sebagian besar geografis wilayahnya terdiri atas perairan dan pulau-pulau baik kecil maupun yang besar, sehingga tidaklah heran status sebagai negara kepulauan (*archipelago state*) disematkan bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan tentu punya kaitan yang sangat erat dengan kemaritiman. Kemaritiman dari sudut pandang sejarah merupakan hal yang perlu dikaji karena kehidupan masyarakat kita yang berhubungan dengan laut. Menurut Usman Thalib (2017), dari sudut geografis Indonesia dapat digambarkan sebagai negara maritim.

Negara Indonesia dibentuk oleh tiga laut inti yaitu Laut Banda, Laut Jawa, dan Laut Flores. Ketiga wilayah laut ini berperan sebagai *heartsea* dalam sejarah Indonesia (Lapian, 1992). Sejarawan Indonesia, Lapian mengatakan bahwa dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, *heartland* tidak merujuk pada pulau tertentu, melainkan pada kawasan maritim yang terletak di posisi strategis dan pusat, dan juga ia mengatakan laut adalah pembuka sejarah bangsa Indonesia dalam pidato pengukuhanannya. Ketiga lautan tersebut membentuk jalur perdagangan utama di wilayah kepulauan Indonesia dan telah digunakan untuk jalur pelayaran serta aktivitas perdagangan antar pulau sejak lama, bahkan sebelum kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Oleh karena itu, Indonesia sepatutnya dipahami sebagai negara kelautan (maritim), bukan sekedar negara kepulauan, sesuai dengan makna asli kata *archipelago*. (Lapian, 1992).

Kedatangan bangsa Eropa ke Asia terjadi karena Portugis berhasil dalam menemukan rute pelayaran yang menghubungkan Eropa dan Asia melalui wilayah Afrika. (Sutherland, 2004). Datangnya bangsa Eropa, membuat peran pedagang Nusantara, India, Cina dan Arab yang awalnya mendominasi dalam jaringan perdagangan rempah-rempah akhirnya menurun setelah diambil alih oleh pedagang-pedagang dari Eropa. Keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah mendorong bangsa Eropa melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan komoditas ini langsung dari sumbernya. Keinginan akan rempah-rempah ternyata memicu semangat tak ada duanya baik pada awal era modern atau beberapa abad dan ribuan tahun sebelumnya (Turner, 2005).

Keterlibatan bangsa-bangsa Eropa dalam perdagangan rempah ini bukan hanya berfokus pada bidang ekonomi, tapi melibatkan interaksi sosial dan budaya yang kompleks antara penduduk lokal dengan para pedagang asing. Contoh nyata dari interaksi ini dapat dilihat melalui peninggalan benteng pertahanan yang tersebar di Provinsi Maluku. Beberapa di antara benteng-benteng tersebut sampai sekarang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda benteng-benteng tersebut dibangun dan difungsikan kembali setelah ditinggal oleh Portugis (Suantika, 2005). Berbagai kebijakan monopoli yang diberlakukan oleh VOC memiliki peran penting dalam jaringan perdagangan cengkeh dan pala di Maluku. Kebijakan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kepulauan Maluku hingga saat ini.

Maluku sebagai *the spice island*, karena menjadi incaran dan pusat persaingan dan perdagangan. Oleh sebab itu, perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak luput dari dinamika kelautan maupun kemaritiman. Budaya maritim memainkan peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya, khususnya di wilayah Maluku. Aktivitas perdagangan rempah di wilayah ini pada dasarnya tidak akan terwujud tanpa kemampuan masyarakatnya dalam mengarungi dan memahami lautan. Laut juga memiliki makna simbolis bagi masyarakat Maluku, menjadi elemen pemersatu antar pulau serta pembentuk identitas dan tradisi masyarakat.

Sebelum kedatangan orang-orang Eropa, Kepulauan Maluku sudah memiliki jaringan perdagangan regional yang menghubungkan pusat-pusat perdagangan di wilayah tersebut. Jaringan ini mencakup pulau-pulau penghasil cengkeh di bagian utara hingga pulau-pulau di bagian selatan yang berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur, yang kaya akan hasil laut langka dan salah satu komoditas paling menguntungkan yaitu rempah-rempah. Maka dari itu, peran kemaritiman masyarakat Maluku ini sudah ada sejak lama. Laut telah menciptakan berbagai sejarah, kearifan lokal, lagu, tarian, dan berbagai tradisi yang menyatu dalam penghayatan batin maupun nalar sosial yang sakral dan diwarisi dari generasi ke generasi.

Beberapa penelitian terdahulu, Buku M. Adnan Amal (2016), dengan judul Sejarah Kepulauan Rempah Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara (1250 – 1950), mengupas

sejarah Kepulauan Maluku Utara dari tahun 1250 hingga 1950, dengan fokus pada peran penting rempah-rempah dalam perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya di wilayah tersebut. Lewat publikasi di atas rempah-rempah menjadi topik yang menarik mencakup berbagai aspek pemahaman tentang rempah-rempah. Penelitian tahun 2014 yang diteliti oleh Mansyur (Balai Arkeologi Ambon), dengan judul “Sistem Perbentengan Dalam Jaringan Niaga Cengkih Masa Kolonial Di Maluku”. Mengambil kesimpulan bahwa sistem monopoli yang dilakukan oleh bangsa Belanda bisa dikatakan berhasil karena jaringan niaga yang berada pada persebaran benteng yang terdapat di pusat-pusat produksi cengkeh dan sekitarnya. Penelitian tahun 2017 yang diteliti oleh Ririmase, dengan judul “Sebelum Jalur Rempah: Awal Interaksi Niaga Lintas Batas Di Maluku Dalam Perspektif Arkeologi”, menjelaskan Kedatangan pedagang asing ke Kepulauan Maluku tidak hanya memperkenalkan berbagai produk baru, tetapi juga memperluas pengetahuan dan ideologi. Kehadiran orang-orang Austronesia membawa pengetahuan tentang pelayaran yang kemungkinan besar menjadi dasar bagi keterampilan maritim penduduk di Kepulauan Maluku.

Berdasarkan permasalahan dan tinjauan pustaka yang sudah dilakukan, diharapkan dapat terungkap lebih lanjut mengenai hubungan antara budaya maritim dan perdagangan rempah di Maluku pada masa VOC dan peninggalan budaya maritim yang ada di Maluku. Dengan demikian, kita dapat lebih menghargai warisan budaya maritim Indonesia dalam hal ini Kepulauan Maluku dan menyadari pentingnya melestarikan sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut. Pengetahuan yang dihasilkan diharapkan memberikan wawasan baru tentang dinamika sejarah yang membentuk identitas dan keberlangsungan masyarakat Maluku hingga saat ini, dan diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sejarah maritim sebagai salah satu penunjang referensi dalam aktivitas akademis di masa yang akan datang.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode sejarah, yang melibatkan empat tahapan utama: *heuristik*, kritik, *interpretasi*, dan *historiografi*. (Sjamsuddin, 2007). Proses penelitian dimulai dengan tahap *heuristik*, yaitu pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder. Proses ini berfungsi sebagai panduan awal bagi peneliti. Sumber sejarah yang diperoleh mencakup sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan yaitu arsip-arsip yang sezaman dengan topik penelitian. sedangkan, sumber sekunder dimanfaatkan untuk merekonstruksi data dari literatur pendukung berupa buku dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan meliputi arsip VOC, laporan penelitian, jurnal, buku, serta dokumentasi terkait eksplorasi dan penelitian yang berkaitan dengan budaya maritim dan rempah-rempah di Maluku. Selanjutnya, dilakukan kritik sumber, kritik sumber merupakan proses evaluasi atau penilaian terhadap semua sumber yang berkaitan dengan objek yang ditelusuri dalam penelitian ini, hal ini dilakukan dalam rangka validasi data. Disini modal seorang sejarawan yaitu sifat tidak percaya terhadap semua sumber sejarah, guna mendapatkan kebenaran keabsahaan dari sebuah sumber (Pranoto, 2010: 35). Setelah sumber-sumber tersebut melalui proses kritik, langkah berikutnya adalah *interpretasi* melalui analisis, sesuai dengan pemahaman peneliti. Langkah terakhir adalah *historiografi* yaitu proses penulisan masa lalu yang dilakukan dengan menyeleksi fakta dan dirangkai menjadi cerita sejarah yang imajinatif secara kronologis (Herlina, 2009: 56-60).

## Hasil Penelitian

### Budaya Maritim dalam Perdagangan Rempah-Rempah di Maluku

Sebelum bangsa Eropa datang ke Maluku, masyarakat di Maluku sudah memiliki perahu-perahu tradisional untuk mengangkut hasil bumi dari pulau-pulau yang ada di Maluku dan diluar Maluku. Seperti yang dikemukakan oleh J.L.A Brandes (1889), sebelum pengaruh kebudayaan luar tersebar di kepulauan Indonesia, bangsa Indonesia sudah mengenal pelayaran. Hal ini tercemin dari gambar-gambar perahu yang dilukis pada dinding goa pada masa prasejarah pada beberapa tempat di Indonesia salah satunya adalah kepulauan Maluku. Masyarakat Maluku yang sudah memahami teknik pembuatan kapal, dan navigasi bukan hanya menjadi produsen rempah-rempah akan tetapi juga memiliki armada dagang. Berdasarkan bukti sejarah yang ditemukan, kora-kora Banda terbukti mampu melakukan pelayaran jauh, seperti perjalanan menuju Hitu di Pulau Ambon pada tahun 1530 untuk membantu Hitu melawan Portugis (Keuning, 1973).

Laut yang sudah melekat bagi masyarakat Maluku bahkan sudah ada sejak jaman prasejarah, bukti yang dapat kita lihat yaitu terdapat beberapa gambar perahu yang ada pada situs-situs gambar cadas di wilayah Maluku (Handoko et al., 2018; Ririmase, 2005; Ririmase, 2011). Situs-situs lukisan cadas yang tersebar luas di wilayah Maluku, juga menampilkan profil perahu dalam berbagai bentuk (Ririmasse 2007). Oleh karena itu, untuk memahami sejarah masyarakat Indonesia, jalan utama yang harus ditempuh adalah melalui sejarah maritim, mengingat Indonesia merupakan negara kelautan. Rekonstruksi mengenai aktivitas bangsa maritim dalam masyarakat Indonesia masih kurang mendapat perhatian. Penelitian hanya memfokuskan kepada navigasi bangsa asing dan Eropa yang berkocol di Indonesia. Kelompok masyarakat maritim belum banyak terungkap aspek kesejarahannya yang ikut andil dalam ruang maritim Indonesia adalah masyarakat Maluku. Kepulauan Banda yang menjadi produsen buah pala, ternyata masyarakatnya juga terlibat dalam jaringan pengangkutan rempah-rempah dari Maluku sampai ke Malaka.



**Gambar 1.** Gambar Cadas Perahu  
Sumber: Ririmase, 2012

Perahu tradisional merupakan salah satu wujud utama dari budaya maritim di masyarakat Maluku. Di Kepulauan Maluku Tenggara, perahu tradisional umumnya dikenal dengan sebutan Belang. Jenis perahu ini memiliki bentuk panjang tanpa *cadik* dan berukuran cukup besar. Selain itu, terdapat juga perahu kecil bercadik ganda yang disebut perahu

semang, serta perahu kecil tanpa cadik yang dikenal sebagai *kole-kole*. Perahu semang dan *kole-kole* biasanya digunakan untuk kegiatan laut sehari-hari, sementara Belang lebih berfungsi sebagai simbol adat dan seremonial. Perahu Belang merupakan alat transportasi laut yang sejak lama digunakan oleh masyarakat Maluku khususnya di Banda sebagai alat menyeberang antar pulau dan mengangkut rempah-rempah. Seiring waktu, perahu ini mengalami perubahan fungsi dan dimodifikasi menjadi perahu untuk perlombaan antar desa. Perahu Belang dapat menampung 28 orang pendayung, yang terdiri dari pemukul tifa, penimba air, dan penari. Pemilihan pendayung untuk perlombaan tidak sembarangan, karena setiap tugas dan fungsi marga-marga dalam desa memiliki peran tertentu.

Sebelum perlombaan dimulai, Perahu Belang akan diberi mantra atau doa adat untuk melindungi para pendayungnya. Pertandingan dayung Perahu Belang menjadi sarana pemersatu masyarakat Maluku. Sedangkan di Maluku tengah, zaman dulu pada pembuatan Belang menggunakan perhitungan astronomi kuno alias *Tanoar* (Perhitungan waktu atau hari baik). Dalam pengambilan kayu, biasanya disertai dengan pembuatan upacara adat. *Tanoar* dilakukan saat akan memilih kayu untuk perahu, sebelum memulai proses pengerjaan perahu dan ketika perahu diturunkan ke laut. Kayu yang sering digunakan untuk pembuatan perahu ini adalah kayu Titi, karena lebih ringan saat diatas air dan menahan ombak. Fungsi perlombaan perahu belang ini untuk mempersatu masyarakat Maluku.



**Gambar 3.** Perahu Belang Banda  
Sumber: *Powerpoint* Usman Thalib

Perahu Kalulis merupakan perahu yang terbuat dari susunan papan dengan menggunakan satu layar segi empat. Dahulu kalulis dibuat menggunakan rotan atau tali hutan "*mimifavatu*", tetapi karena perkembangan baru maka digunakan dengan kayu sejak tahun 1940-an. Sudah sejak abad ke-17 perahu kalulis memegang peranan penting dalam hubungan antar pulau, yaitu pulau Kei dengan pulau lainnya di Maluku. Keahlian para pembuat perahu di pulau Kei cukup populer pada masa itu, sehingga hasil perahunya dibutuhkan oleh para pelaut di Banda, Seram, dan Ambon yang pada saat itu berada dibawah penjajahan VOC. Perahu-perahu kalulis dibeli dengan cara barter berupa gong, meriam, dan emas yang diperoleh oleh bangsa Eropa. Barang-barang barter ini yang menjadi peran penting sebagai harta kawin di Maluku.



**Gambar 4.** Perahu Kalulis  
Sumber: Museum Siwalima Ambon

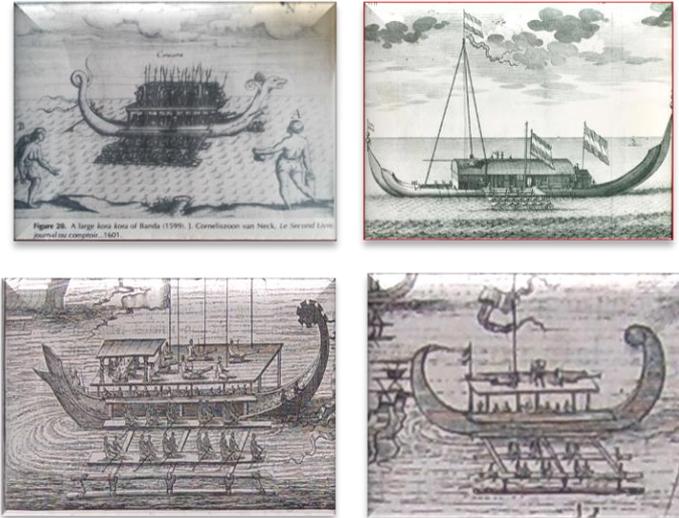
Antonio Galvano, yang pernah tinggal di Maluku 1536-1539, mencatat dan mengidentifikasi jenis-jenis kapal yang digunakan oleh masyarakat Maluku Utara yaitu *juanga*, *lakafunu*, *kora-kora*, *kalulus*, dan perahu kecil (Lapian, 1997). Untuk Kepulauan Maluku terdapat beberapa jenis kapal yaitu *belang*, *ruhehe*, *kalulis*, *Arumbae*, *kora-kora*, perahu layar (*Jung*), perahu semang (*bero*). Perahu berfungsi sebagai simbol penting di kerajaan-kerajaan dan memainkan peran penting sebagai penghubung antarpulau sekaligus sebagai sarana komunikasi sosial dan budaya antar suku bangsa. Hal ini berlaku baik antara masyarakat Indonesia (Maluku) maupun dengan masyarakat lain melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan.

Kondisi geografi kepulauan Maluku, secara umum didominasi oleh lautan yang memisahkan pulau-pulau yang ada di kepulauan ini. Dengan kondisi ini sehingga alat transportasi penghubung antar pulau adalah perahu. Masyarakat Maluku dari zaman prasejarah, sudah mengenal dan paham teknologi pembuatan dan penggunaan perahu. Mulai dari perahu sederhana dari sebuah batang pohon, sampai pada perahu yang menggunakan layar sudah dikenal oleh masyarakat Maluku. Selain perahu terdapat juga peralatan penangkapan ikan yang masih sangat sederhana pada masa lalu yaitu sero, bubu, pana-pana, pancing, jala, dan lain-lain. Peralatan-peralatan ini umumnya dimiliki secara individu dan dibuat dengan menggunakan teknologi sederhana. Pengetahuan spesifik ini juga mencakup keterampilan tradisional dalam menangkap ikan dan memanfaatkan sumber daya maritim lainnya, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan sumber daya di dalam lingkup kepulauan (de Jonge & van Dijk 1995; Fox 2000; Ririmasse 2010).

Peran perahu tradisional masyarakat Maluku dalam perdagangan rempah-rempah bisa dilihat ketika VOC membuat kebijakan mengenai *Hongitochten*. *Hongi* merupakan kewajiban yang ditanggung oleh masyarakat Ambon dan Lease untuk menyediakan armada kora-kora dan tenaga pendayungnya. Tenaga pendayung ini sekaligus berperan sebagai serdadu (Knaap, 2002). Pelayaran hongis telah berlangsung sejak masa pendudukan Portugis dan sistem ini dilanjutkan oleh Belanda setelah berhasil merebut penguasaan atas wilayah Maluku. Sejak pemerintahan Portugis, telah berlangsung hubungan antara penduduk Leitimor (bagian timur Pulau Ambon) untuk menyediakan perahu pengangkut yang disebut dengan kora-kora (perahu tradisional Maluku). Armada inilah yang kemudian digunakan untuk melaksanakan pelayaran hongis atau pada masa Belanda disebut ekspedisi *hongitochten* (Patikayhatu, et al., 2009:).

Kora-kora merupakan perahu tradisional Maluku, pada abad ke-16-18, perahu ini digunakan untuk perang laut, mengangkut manusia maupun barang, dan mengawal

pemerintah VOC dalam pelayaran *hongitochten*. Pada masa Kolonial, kora-kora berbentuk panjang dan dapat memuat 75-150 orang pendayung. Bukan hanya sebagai pendayung, mereka juga sebagai prajurit perang. Dalam buku Vallentijn tercatat ada 66 kora-kora di Maluku Tengah.



**Gambar 5.** Kora-kora  
Sumber: *Powerpoint Usman Thalib*

Tujuan Pelayaran *Hongi* ialah untuk melakukan penebangan tanaman cengkih secara besar-besaran di Maluku. Penebangan tanaman cengkih secara besar-besaran oleh Belanda melalui patroli *Hongi* disebut *Ekstirpasi*, tujuannya untuk menjaga agar harga tanaman tetap stabil di pasaran dunia. Akibat peraturan dalam monopoli tersebut, rakyat Maluku menjadi tertekan dan tertindas. Sejak VOC menjalankan pelayaran *hong*i atau ekspedisi ke berbagai wilayah di Maluku untuk menghancurkan tanaman cengkih. Sebagai salah satu sentra produksi cengkeh, VOC juga mendirikan beberapa bangunan dan menerapkan beberapa sistem terhadap masyarakat di Maluku untuk menunjukkan eksistensi mereka terhadap perdagangan rempah.

Oleh sebab itu, pelayaran *hong*i tidak hanya menjadi kebijakan VOC untuk mengontrol perdagangan rempah, tetapi juga bergantung pada armada dan keahlian maritim masyarakat Maluku. Armada kora-kora yang disediakan oleh masyarakat lokal, termasuk tenaga pendayungnya, menunjukkan sinergi budaya maritim lokal dengan kebutuhan ekspansi ekonomi VOC. Meski demikian, kebijakan seperti *ekstirpasi* yang dilakukan dalam pelayaran *hong*i memiliki dampak negatif terhadap keseimbangan sosial dan ekologi masyarakat Maluku, yang sebelumnya sangat bergantung pada kearifan lokal seperti *sasi* yang artinya larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian alam dan demi menjaga mutu hasil sumber daya alam tersebut.

Dewasa ini perahu kora-kora telah punah dan tidak diproduksi lagi, sebagai akibat dari kemajuan bentuk-bentuk perahu kapal bermesin sebagaimana ditemukan kapal uap/kapal api di Eropa. Namun teknologi pembuatan perahu tradisional di beberapa tempat di Maluku seperti di Tanimbar, Kei Kecil, Banda, Buano, Seram, Noloth dan sebagainya, masih tetap diproduksi sebagai alat transportasi masyarakat.

### **Dampak Monopoli VOC terhadap Perdagangan Rempah di Maluku**

Sejak kedatangan Belanda di Maluku pada awal abad ke-17 tepatnya tahun 1605, mereka mulai membangun jaringan perdagangan yang kompleks untuk menguasai rempah-rempah. Melalui monopoli dagang, Belanda berusaha mengendalikan pasokan dan harga rempah-rempah di pasar internasional. Kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pihak kolonial, tetapi juga membawa dampak signifikan bagi masyarakat lokal yang bergantung pada perdagangan rempah-rempah sebagai sumber penghidupan (Ricklefs, 2012). Hal ini karena, rempah-rempah pada masa itu bisa memberikan keuntungan yang besar untuk para pedagang, sehingga mereka berlomba-lomba untuk datang dan mencarinya (Siryayasa & Yasin, 2019).

Masyarakat Maluku, yang telah lama terlibat dalam perdagangan rempah, beradaptasi dengan kehadiran Belanda yang memperkenalkan sistem perdagangan baru dan praktik ekonomi yang berbeda. Hubungan antara pedagang lokal dan Belanda sering kali ditandai dengan ketegangan, di mana masyarakat lokal berusaha mempertahankan kendali atas sumber daya mereka, sementara Belanda berusaha memperkuat dominasi mereka (Brouwer, 2010). Dalam konteks ini, rempah-rempah tidak hanya berfungsi sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan dan prestise di kalangan negara-negara Eropa. Penguasaan atas rempah-rempah menjadi tolak ukur kekuatan kolonial, yang menciptakan persaingan sengit di antara negara-negara Eropa. Maluku, sebagai pusat rempah, menjadi saksi pertarungan geopolitik yang berpengaruh pada sejarah kawasan tersebut (Maddison, 2019).

Hal tersebut bisa dibuktikan pada masa VOC memonopoli cengkeh, masyarakat Maluku diberikan potongan harga untuk cengkeh yang dijualnya. Untuk setiap Bahar (550 *Amsterdamsche Pond*), dikenakan biaya 56 *Rijksdaalder*, 20% dipotong dari jumlah tersebut oleh pejabat pemerintah, dan kemudian 5 *Rijksdaalder* dipotong sebagai "*hatsil-geld*" untuk pejabat-pejabat negeri yang bersangkutan, ada juga potongan berupa: "*pitis-geld*" untuk tukang timbang cengkeh. Kebijakan ini berlaku sampai tahun 1865 ketika masa monopoli cengkeh dihapuskan (Leirissa et al., 1982).

Berdasarkan uraian dari berbagai sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa VOC mengambil berbagai langkah untuk mewujudkan monopoli cengkih di wilayah Maluku. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah, tetapi juga untuk memperkuat sistem monopoli mereka. Beberapa tindakan yang ditempuh antara lain:

1. Mengatasi perlawanan dari penguasa-penguasa lokal terkait perdagangan cengkeh, khususnya di wilayah Hitu, Iha, dan Hoamual. Setelah berhasil meredam perlawanan dari penguasa lokal, VOC semakin bebas untuk menciptakan perpecahan internal di kalangan penguasa lokal. Beberapa langkah yang diambil antara lain: di Hitu VOC memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Hitu dan memecah menjadi empat kekuasaan Perdana Hitu, yang akhirnya melemahkan pengaruh Kerajaan Hitu. Tindakan serupa juga diterapkan di Iha, dengan merelokasi penduduk Iha ke daerah Hoamual. Selain itu, VOC juga menyerahkan wilayah Iha kepada pihak-pihak yang bersedia bekerja sama. Di Hoamual, VOC juga memindahkan penduduk ke berbagai lokasi lain di Maluku.
2. Sejak awal, VOC melaksanakan *hongitochten* atau ekspedisi ke berbagai daerah di Maluku untuk memusnahkan tanaman cengkeh. Ekspedisi ini memiliki dua tujuan utama, yaitu: pertama, mengurangi produksi cengkeh agar harga tetap terjaga, dan kedua, menutup jalur perdagangan ilegal, terutama yang dilakukan oleh pedagang dari Makassar, yang sering berinteraksi di beberapa daerah di Maluku. Situasi semakin memburuk ketika pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan sistem *hong* dan *ekstirpasi* pada akhir abad ke-18. Kebun cengkih dan pala milik rakyat dihancurkan, baik dengan cara ditebang maupun

- dibakar, untuk mencegah penumpukan hasil cengkeh yang dapat menyebabkan penurunan harga di pasar Eropa.
3. Keberhasilan VOC merelokasi pemukiman masyarakat lokal dari daerah perbukitan ke daerah pesisir sebagai upaya untuk memudahkan pengawasan terhadap masyarakat di Kepulauan Lease, termasuk dalam hal budidaya tanaman cengkeh dan juga mengontrol penjualan cengkeh ke pedagang gelap (Makassar). Hal ini terjadi, setelah perlawanan rakyat Hitu ditaklukan maka Gubernur Jenderal Demmer memerintahkan penduduk yang berdiam di pegunungan untuk turun berdiam di tepi pantai, dan membubarkan sistem pemerintahan tradisional pada tahun 1646.
  4. Pada masa pemerintahan van Speult pada tahun 1625, VOC mengimplementasikan kebijakan untuk menanam pohon cengkeh secara masif di Leitimor dan Lease, yang keduanya berada di bawah kekuasaan VOC. Kebijakan ini diambil karena VOC gagal menjalin kerja sama dengan Hoamual terkait perdagangan cengkeh, di mana pada waktu itu Hoamual merupakan penghasil cengkih terbesar di Maluku bagian tengah.
  5. Keberhasilan VOC dalam memaksa Kesultanan Ternate untuk menandatangani perjanjian pada tahun 1652, yang mengatur agar produksi cengkih dipusatkan di Kepulauan Lease, menjadi langkah penting dalam pengendalian perdagangan rempah. Sebelum perjanjian ini, beberapa daerah di Maluku bagian tengah seperti Hoamual dan Hitu sudah dikenal sebagai pusat produksi cengkeh. Dalam perjanjian tersebut, VOC juga berjanji akan memberikan kompensasi tahunan kepada Kesultanan Ternate. Dengan kesepakatan ini, Hoamual, yang sebelumnya merupakan penghasil utama cengkih dan bagian dari Kesultanan Ternate, semakin terjepit oleh tekanan VOC.
  6. VOC juga membangun sistem benteng di wilayah yang telah ditentukan sebagai pusat produksi cengkeh di Kepulauan Lease. Benteng-benteng ini tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan, tetapi juga sebagai infrastruktur untuk mendukung sistem perdagangan cengkih. Tipe benteng yang dibangun, yaitu *blokhuis*, dirancang untuk lebih mengutamakan fungsi sebagai gudang komoditi. Setiap *blokhuis* dilengkapi dengan dermaga untuk memudahkan pengiriman cengkih ke pusat pengumpul yang lebih besar.
  7. Kebijakan berikutnya adalah sistem tanah *Dati*, yaitu tanah yang dimiliki oleh keluarga inti atau kelompok orang yang memiliki marga yang sama, di mana tanah tersebut dikelola oleh keluarga-keluarga batih. Sistem ini telah ada sejak masa VOC, yang mewajibkan pemilik tanah *dati* untuk menanam pohon cengkeh dalam jumlah tertentu, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Hasil panen cengkeh tersebut kemudian dijual kepada VOC dengan harga yang juga sudah ditentukan. Sistem ini dikenal sebagai sistem *dati*, yang membuat pemerintah Belanda melakukan pencatatan secara rinci tentang penduduk di suatu desa, serta tanah *dati* beserta pohon cengkeh dan buahnya. Masyarakat yang terlibat dalam sistem tanah *dati* harus menyesuaikan pola tanam dan kehidupan mereka dengan permintaan VOC yang membuat mereka lebih fokus pada perdagangan cengkeh daripada kegiatan tradisional lainnya.
  8. VOC menerapkan sistem yang berbeda untuk komoditas pala dengan adanya perken atau perkebunan pala. Sistem ini melibatkan pembagian tanah-tanah subur di Pulau Ay, Pulau Lonthor, dan Pulau Banda yang ada di Kepulauan Banda. Proses pembagian ini dimulai pada tahun 1616 dan selesai pada tahun 1628. Perkebunan pala yang terbentuk kemudian diserahkan kepada orang-orang Eropa yang memiliki modal dengan sistem sewa. Namun, seiring waktu, perkebunan tersebut beralih menjadi hak milik dan mengalami banyak perubahan, termasuk perluasan lahan melalui pembelian serta pengurangan lahan karena pembagian warisan kepada generasi berikutnya. Perkebunan-perkebunan ini selanjutnya dikelola dengan mendatangkan pekerja dari Jawa, Buton, dan daerah-daerah lain.

Keberhasilan Belanda dalam menguasai wilayah ini memungkinkan penerapan sistem pembagian tanah dan pengangkutan tenaga kerja dari luar.

9. Keuntungan besar dari perdagangan cengkeh mendorong pegawai dan pejabat VOC terlibat dalam praktik korupsi dan kolusi. Akibatnya, kongsi dagang tersebut akhirnya bangkrut. Dengan kebangkrutan VOC, pemerintah kolonial meninggalkan Maluku dalam kondisi miskin. Tanaman cengkeh dan pala yang dihancurkan demi menjaga harga tetap stabil mengakibatkan kemerosotan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pada akhirnya, Maluku hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah ekonomi yang hilang, atau dalam ungkapan lain, Maluku menjadi masa silam.

### **Peninggalan Masa VOC dan Relevansinya pada Budaya Maritim**

Periode monopoli rempah-rempah yang berada di masa VOC merupakan periode penting dalam sejarah kepulauan Maluku. Banyak kebijakan yang diterapkan oleh VOC dalam masa pemerintahannya. Banyak peninggalan sejarah masa VOC ketika melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Berbagai kebijakan ini membawa pengaruh pada masyarakat Maluku. Sebagaimana disebutkan, periode monopoli rempah-rempah pada masa VOC menjadi periode penting dalam sejarah Maluku. Sistem ini pertamakali diterapkan oleh VOC dan dipertahankan terus oleh Pemerintah Hindia Belanda hingga tahun 1863. Kebijakan ini sekaligus membawa pengaruh dalam berbagai aspek, di Maluku. Kini, jejak peninggalan yang pernah dibangun oleh VOC masih banyak berdiri kokoh.

Persepsi sejarah pulau-pulau di Maluku dimata dunia sangat melekat dengan rempah-rempah dan kolonialisme dan imperialisme Eropa. "Buah Emas" bernama rempah-rempah ini akhirnya sanggup merubah sejarah Maluku masuk ke dalam era Kolonialisme Eropa selama hampir empat abad, dan melahirkan negeri yang kita kenal sebagai Maluku sekarang (Rijoli, 1994). Untuk membuktikan kehadiran bangsa Eropa di Maluku banyak peninggalan yang berbentuk benteng, kota, rumah-rumah bergaya Eropa, perk, dan gereja.

Ciri kolonial yang kuat masih nampak di Banda lewat berbagai bangunan dengan ciri kolonial di seantero sudut kota mungil ini. Di Ambon, hampir semua bangunan tinggalan kolonial (kecuali benteng Victoria dan amsterdam) sudah hilang, namun struktur jalan kota, toponim, dan pola tata kota saat ini dapat dikatakan tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan kondisi kota di era kolonial. Bila berkaca dengan jujur dan jernih, harus diakui bahwa sebagian besar objek dan situs arkeologis di Maluku tidak mendapatkan penanganan yang seharusnya selama ini. Baik untuk objek yang bersifat artefaktual maupun objek yang bersifat monumental. Sumber daya arkeologis di hampir semua wilayah Maluku sebagian besar berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Secara umum, benteng adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai simbol pertahanan. Namun, seiring dengan beragam aktivitas yang berlangsung di dalam benteng, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial, fungsi benteng pun berkembang menjadi pusat administrasi, pemerintahan, dan perdagangan. Bangsa Eropa merasa perlu membangun benteng untuk mendukung kelancaran usaha mereka dalam mengumpulkan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala, yang memiliki nilai jual tinggi di pasar Eropa. Berdasarkan pengamatan terhadap lokasi benteng di Maluku, yaitu benteng yang terletak di daerah pesisir dan perbukitan, dapat diasumsikan bahwa benteng di daerah pesisir terkait dengan strategi dan taktik peperangan maritim. Profil wilayah Maluku yang merupakan daerah kepulauan sangat mendukung penerapan strategi ini. Selain itu, pengamatan terhadap sisa-sisa struktur di sekitar benteng menunjukkan bahwa benteng yang terletak di pesisir umumnya dilengkapi dengan dermaga atau pelabuhan.

Pelabuhan Ambon dan Banda pada masa VOC bukan hanya sebagai tempat transit tetapi sekaligus menjadi enterport bagi VOC. VOC menyadari pentingnya pelabuhan dalam mendukung kegiatan perdagangan rempah-rempah. Pemanfaatan pelabuhan ini terus dipertahankan oleh VOC sebagai pusat pangkalan laut bagi kapal-kapalnya untuk mempermudah monopoli rempah-rempah. VOC melakukan patroli *hong* yang berintikan pada kapal-kapal VOC dan kora-kora pribumi. Setiap tahun VOC mengirim armada perang kora-kora untuk mengontrol dan melaksanakan pembatasan penanaman rempah-rempah. Meski demikian, jika mengamati lokasi pelabuhan maka penempatan sebuah dermaga dekat dengan kantor pemerintahan merupakan pola penempatan masa kolonial yang umum dijumpai di tempat-tempat lain di Maluku. Peninggalan-peninggalan ini sampai sekarang masih berdiri kokoh di kepulauan Maluku, peninggalan seperti benteng-benteng dijadikan sebagai cagar budaya, media pembelajaran bagi siswa dan mahasiswa, juga sebagai wisata sejarah bagi masyarakat local dan masyarakat luas yang ingin belajar mengenai sejarah kepulauan Maluku.

Selain, peninggalan benteng terdapat budaya kearifan lokal yang masih dilestarikan sampai saat ini yaitu Kearifan Lokal *Sasi*, sejak abad ke-16, sumber daya di Maluku telah dikelola di bawah sistem yang disebut sasi. Sasi mencakup larangan spasial dan temporal untuk memanen tanaman, menebang kayu atau mengumpulkan produk lain dari hutan, zona pasang surut atau wilayah laut suatu desa. Ini juga mengatur interaksi sosial. Karena sifatnya yang terbatas, sasi adalah mekanisme konservasi yang diduga. Sasi laut (sasi laut). Undang-undang adat yang ditetapkan oleh masyarakat Maluku dikenal sebagai sasi. Larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu dalam upaya pelestarian untuk menjaga kualitas dan populasi sumber daya hayati (hewani dan nabati) alam dikenal sebagai sasi (Hernandi et.al., 2017). Dalam ketentuan hukum adat mengenai sasi, ada tiga hal yang sangat penting. Pertama, sasi mengandung unsur larangan memanfaatkan sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, sasi menemukan hubungan antara peraturan adat dan kemampuan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, hukum sasi mencakup baik lingkungan alam maupun sosial (Kusumadinata, 2015). Terakhir, Proses pengelolaan sasi di Desa Haruku terbagi menjadi empat kategori utama. Masing-masing kategori memiliki fokus dan aturan yang unik. Pertama, Sasi Laut, yang menangani eksploitasi sumber daya laut; kedua, Sasi Kali, yang mengatur pemanfaatan ikan lompang dan kegiatan sehari-hari seperti mandi dan mencuci; dan ketiga, Sasi Hutan, yang menangani eksploitasi sumber daya di darat; dan keempat, Sasi Dalam Negeri, yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Haruku. Di Desa Haruku, setiap jenis sasi memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan, keberlanjutan, dan keharmonisan sosial (Karepesina et.al., 2013). Sasi ikan lompang adalah tradisi kearifan lokal di Desa Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Ini merupakan bagian penting dari hukum adat yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup, terutama mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Dalam esensinya, sasi ikan lompang bertujuan untuk mencegah kerusakan ekosistem laut yang dapat disebabkan oleh aktivitas ekstraktif yang tidak bertanggung jawab.

Kearifan Lokal *Vean*, merupakan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Ohoi Disuk di Maluku Tenggara. Masyarakat disini memanfaatkan sumber daya alam yang ada menjadi sumber mata pencaharian di laut. *Vean* merupakan tradisi penangkapan ikan di Disuk, pulau Kei Kecil, kabupaten Maluku Tenggara. *Vean* sendiri menggunakan bahan lokal atau bahasa daerah kepulauan Kei. Nama lain dari *Vean* adalah *Sero*. *Sero* adalah alat yang digunakan untuk menangkap ikan di perairan dangkal yang terbuat dari kayu tangke/bakau (*Rhizophora racemose*) dan belahan atau potongan bambu yang telah *dianyam* atau dibentuk dan ditanam di air yang dangkal (4 - 6 meter). Belahan atau

potongan bambu yang sudah dirangkai diikat pada tongkat kayu yang sudah dibuat. *Sero* dirancang sedemikian rupa sehingga ikan yang masuk ke dalamnya tidak dapat keluar lagi, sero berbentuk seperti huruf (V) dengan pintu masuk ikan di kepala *sero*. Ketika air pasang, ikan akan masuk ke dalam sero, dan saat air surut, nelayan akan mengambil ikan tersebut dengan cara menyebarkan jala. Sistem penangkapan ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat Maluku.

Kearifan lokal *Vean* hanya diketahui dan dilakukan oleh anak cucu dari marga-marga yang masih mempertahankan dan menjalankan tradisi ini. Namun tidak semua anak dan cucu diberitahukan kerahasiaan dari kearifan lokal ini. Marga yang dapat melakukan tradisi ini antara lain: Jaftoran, Leftungun, dan Welikin.



**Gambar 5.** *Vean*

Sumber: Dokumen Pribadi & Perpustakaan Leiden University 2024

Festival Arumbai Manggurebe, Kepulauan Maluku merupakan bagian dari gugusan kepulauan di Nusantara yang terletak di wilayah Indonesia Timur. Sebagai daerah kepulauan, nenek moyang masyarakat Maluku sejak lama dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Kisah-kisah tentang keberanian mereka di lautan terus diwariskan dari generasi ke generasi untuk menjaga ingatan akan identitas leluhur sebagai pelaut. Perjuangan mereka di lautan ini dikenal dengan istilah *Arumbae*. Festival *Arumbai Manggurebe* adalah acara pariwisata tahunan yang diselenggarakan di provinsi Maluku, dengan tujuan untuk menampilkan keindahan alam maritim Maluku, terutama di wilayah Teluk Ambon, yang kini menjadi salah satu destinasi wisata dengan ikon Jembatan Merah Putih yang menawan. Festival ini mengkombinasikan wisata maritim dan budaya, yang disajikan sebagai hiburan menarik bagi masyarakat sekaligus berfungsi untuk melestarikan budaya maritim yang masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Maluku. Budaya maritim seperti perahu tradisional yang berasal dari Kepulauan Maluku ini dikenal dengan nama Perahu Belang. Memiliki desain panjang dan ramping, perahu ini dapat menampung sekitar 30 orang. Perahu ini hampir punah pada masa penjajahan Belanda, namun pada tahun 1970-an, sejarawan Des Alwi berupaya untuk memperkenalkan kembali Perahu Belang kepada masyarakat Kepulauan Maluku.



**Gambar 6.** Festival Arumbai

Pengetahuan lokal-tradisional masyarakat tentang laut dan pelayaran tercermin dalam pemahaman mengenai musim, cuaca, dan navigasi. Data historis yang menunjukkan jalur pelayaran tradisional Kei, Banda-Maluku Tengah, mengungkapkan bahwa kemampuan ini telah berkembang di masa lalu untuk mendukung pelayaran jarak jauh antar pulau. Sejak lama masyarakat Kei dikenal sebagai pembuat perahu yang terampil. Karya-karya mereka di masa lalu sering kali diperdagangkan hingga ke Kepulauan Banda, Seram, dan pulau-pulau lainnya.

Sebelum kedatangan bangsa Eropa, komoditi pangan yang bersifat sehari-hari umumnya didukung oleh pulau-pulau berukuran besar, seperti Seram, untuk wilayah bagian tengah Maluku dan Halmahera untuk wilayah utara. Sagu merupakan salah satu komoditi utama yang dihasilkan di sini. Untuk komoditi eksotis yang lebih bernilai ekonomis lebih tersebar di hampir seluruh pulaupulau yang ada di Kepulauan Maluku. Selain Ternate, Tidore yang menghasilkan cengkeh serta Banda yang menghasilkan pala, beberapa pulau juga memiliki produk yang khas. Kepulauan Aru memiliki mutiara serta bulu burung cendrawasih. Kepulauan Kei merupakan penghasil teripang dan produk-produk maritim langka (de Jonge dan van Dijk, 1995). Hal ini menjadikan adanya hubungan dari titik-titik inilah yang kemudian membentuk sistem niaga lokal di Maluku yang bertautan dengan jalur rempah pada skala kawasan dan global (de Jonge dan van Dijk, 1995).

Masyarakat Maluku mengandalkan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun dalam bidang navigasi laut. Dengan menggunakan alat-alat sederhana dan pemahaman terhadap alam, mereka dapat melakukan pelayaran jarak jauh ke berbagai pulau dan negara tujuan, menghubungkan pasar-pasar lokal dengan pasar global rempah-rempah. Ada beberapa istilah navigasi pada masyarakat Maluku yaitu:

1. *Tanuar*, merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki masyarakat kepulauan Maluku yang menuntun mereka untuk melakukan perhitungan dan pertimbangan dengan membaca tanda alam kepulauannya baik di darat atau di laut, sehingga mereka dapat menentukan waktu yang tepat untuk pergi melakukan aktivitas sebagai nelayan ataupun petani.
2. *Nanaku*, merupakan salah satu kearifan lokal, untuk menganalisis situasi atau kondisi kehidupan yang bersifat sosial maupun alami. *Nanaku*, sering berhubungan dengan gejala atau tanda-tanda kehidupan yang positif maupun negatif berupa kelaparan, kekereringan dan lainnya. Masyarakat juga sering sebelum berangkat mencari ikan atau mau berlayar jauh pasti akan *Nanaku*, cuaca apakah baik atau tidak.

3. Ilmu Perbintangan, bentuk tradisi yang selalu digunakan dalam pelayaran atau pencaharian di laut, guna menentukan perjalanan dalam pelayaran.
4. Ilmu Ruang, merupakan bentuk tradisi masyarakat yang menjadikan ruang (air di dalam perahu), baik arah gerakan maupun bunyinya sebagai sarana perhitungan atau perkiraan untuk menentukan kondisi alam laut, arah mata angin, dan arah pelayaran yang ingin ditempuh.

### **Kesimpulan**

Budaya maritim masyarakat Maluku merupakan inti kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi signifikan terhadap perdagangan rempah-rempah dunia pada masa VOC (1605-1799). Tradisi seperti navigasi lokal, penggunaan perahu tradisional seperti kora-kora dan belang, serta kearifan lokal seperti sasi menjadi elemen kunci dalam mendukung jaringan perdagangan global. Namun, kebijakan monopoli VOC, termasuk pelayaran *hong* dan *ekstirpasi*, membawa dampak signifikan terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Selain menimbulkan penindasan, kebijakan ini juga mengubah pola hidup tradisional dan mempersempit ruang bagi keberlanjutan kearifan lokal. Meskipun begitu, budaya maritim Maluku tetap bertahan melalui adaptasi dan resistensi masyarakat lokal. Jejak budaya ini masih terlihat hingga kini dalam bentuk ritual adat, festival maritim, dan penggunaan perahu tradisional. Penelitian ini menekankan pentingnya melestarikan warisan budaya maritim Maluku sebagai bagian dari identitas maritim Indonesia dan sebagai pelajaran dari sejarah tentang bagaimana masyarakat lokal dapat bersinergi dengan dengan budaya maritim, namun tetap bertahan dari tantangan globalisasi ekonomi.

### **Daftar Rujukan**

- Amal, M. A. (2010). *Kepulauan Rempah-rempah Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Brouwer, J. (2010). *Perdagangan Rempah-rempah Persahaan Hindia Timur Belanda*. Amsterdam: University Press.
- de Jonge, N. dan T. van Dijk. (1995). *Forgotten Islands of Indonesia: The Art and Culture of the Southeast Mollucas*. Singapore: Tuttle Publishing
- Fox, J.J. 2000. Maritime Communities in the Timor and Arafura Region: Some Historical and Anthropological Perspective. In S. O'Connor and P. Veth (ed.), *East of Wallace's Line: Modern Quaternary Research in Southeast Asia: 337-356*. Rotterdam: A.A Balkema.
- Handoko,W., Peseletehaha, G. A., Huwae, A., & Rumaf, T.G. (2018). Kaimear Island Rock Art Site at Kur Island in West Kei Island Region, A New Discovery in Eastern Indonesia. *Kapata Arkeologi*, 14(2), 123-134.
- Herlina, N. (2009). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Hernandi, A., Sadikin, H., & Mirolas, M. (2017). Perbandingan Sistem Penguasaan Laut Adat Di Desa Haruku Maluku Dengan Sistem Penguasaan Laut Nasional. *Jurnal Sositologi*, 16(3), 274-287. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2017.16.3.4>
- Keuning, J. 1973. *Sejarah Ambon Sampai Pada Akhir Abad Ke-17*. Jakarta: Bhratara.
- Knaap, G. J. (2002). *Kora-kora en kruitdamp de verenigde oost-indische compagnie in oorlog en vrede in Ambon*. Leiden: KITLV.
- Lapian, A.B. (1992). *Sejarah Nusantara Sejarah Bahari*. Jakarta: Universitas Indonesia

- Lapian, A.B. (1997). *Ternate Sekitar Pertengahan abad XVI; Catatan Antonio Galvano, Kapitan di Ternate (1535-1539)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Leirissa, R.Z, Manusama, Z.J., Lapian, A.B., Abdurrachman, P.R. 1982. *Maluku Tengah di Masa Lampau: Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Maddison, A. (2019). *Pertumbuhan Ekonomi di Asia dan Pasifik*. Tokyo: Asian Development Bank.
- Mansyur, Syahrudin. (2014). Sistem Perbentengan dalam Jaringan Niaga Cengkih Masa Kolonial di Maluku. *Kapata Arkeologi*, 10(2), 85-98.
- Patikayhatu, dkk., 2009. *Sejarah Negeri dan Desa di Kota Ambon*. Ambon: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
- Pranoto, S. W. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ricklefs, M.C. (2012). *Sejarah Indonesia Modern sejak tahun 1300*. Stanford: Stanford University Press.
- Rijoli, F. (1994). *Buah Emas dari Banda, Laporan Survey Pengadaan*. Ambon: Museum Negeri Siwalima.
- Ririmase, M. N. (2005). Jejak dan Prospek Penelitian Arkeologi di Maluku. *Kapata Arkeologi*, 1(1), 35-55.
- Ririmase, M. N. (2007). Visualisasi Tema Perahu dalam Rekayasa Situs Arkeologi di Maluku, *Naditira Widya*, 2(1). Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Ririmase, M. N. (2011). Perahu sebagai Simbol di Maluku Tenggara (Sebuah Pengantar). *Kapata Arkeologi*, 7(12), 1-17.
- Ririmase, M. N. (2010). Arkeologi Pulau-pulau Terdepan di Maluku: Sebuah Tinjauan Awal, *Kapata Arkeologi*, 6(10). Ambon: Balai Arkeologi Ambon.
- Ririmasse, M.N. (2012). Laut untuk Semua: Materialisasi Budaya Bahari di Kepulauan Maluku Tenggara, *AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*. 30(1).
- Ririmase, M. N. (2017). Sebelum Jalur Rempah: Awal Interaksi Niaga Lintas Batas Di Maluku Dalam Perspektif Arkeologi: Before the Spice Route: Cross Border Trade Initiation in Maluku in the Archaeological Perspective. *Kapata Arkeologi*, 13(1), 47-54.
- Siryayasa & Yasin. (2019). Pelabuhan, Perdagangan Dan Ekonomi: Makassar Dalam Kurun Niaga di Asia Tenggara: *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 3(2), 85-97. <https://doi.org/10.29408/fhs.v3i2.2120>.
- Suantika, I Wayan. (2005). *Peran dan Fungsi Benteng Peninggalan Masa Kolonial bagi Pembangunan Daerah Maluku, Dalam Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (EHPA)*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
- Sutherland, H. (2004). *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Ombak
- Turner, Jack. (2004). *The History of a Temptation*. New York: Vintage Books.
- Thalib, U. (2017). Orang Banda Dalam Perspektif Sejarah Maritim. *Paradigma: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humanior*. 3(2), 28-48. <https://doi.org/10.62176/paradigma.v3i1.166>.